

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

□ Kabupaten Bogor bukan merupakan daerah yang masuk kedalam penghitungan IHK di Jawa Barat. BPS Kabupaten Bogor bekerjasama dengan Bappedalitbang hanya menghitung inflasi sampai dengan Bulan September 2019, sedangkan dari Bulan Oktober 2019 s/d Bulan Nopember 2020 tidak menghitung inflasi, sehingga TPID Kabupaten Bogor terkait inflasi mengambil data dari sistercity daerah IHK yaitu Kota Bogor. □ Untuk triwulan II (April s.d Juni 2021) tingkat inflasi di Kota Bogor dilihat dari data inflasi bulanan cenderung naik. Pada bulan April dan Mei 2021 terjadi inflasi sebesar 0,24 % dan 0,4 % yang di picu dari kelompok makanan dan minuman serta tembakau. Sedangkan dalam bulan Juni 2021 mengalami deflasi sebesar 0,17 % yang dipicu oleh kelompok makanan dan minuman, tembakau serta dari kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga. □ Berdasarkan data harga rata-rata komoditas di Kabupaten Bogor pada periode April-Juni 2021, dari 16 komoditas yang dipantau harganya setiap minggu di tingkat pedagang, 4 komoditas (25%) mengalami fluktuasi harga yaitu Cabai Merah Besar, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah dan Jagung Pipilan. Sementara 12 komoditas (75%) lainnya yaitu Beras Premium, Beras Medium, Gula Pasir, Minyak Goreng Curah, Tepung Terigu, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Hijau, Kacang Kedelai, Daging Ayam Ras, Daging Sapi (Murni) dan Telur Ayam Ras stabil. Pada periode April hingga Juni 2021, harga rata-rata cabai merah besar tertinggi terjadi pada bulan Mei yang bertepatan menjelang Hari Raya Idul Fitri, kenaikan harga kemungkinan disebabkan kenaikan permintaan pasar. Pasokan Cabai Merah Besar berasal dari Kota Bogor, Pasar Induk TU, Pasar Induk Kemang dan Pasar Induk Tangerang.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

□ Nilai inflasi dihitung oleh BPS hanya untuk level Kota sehingga nilai Inflasi Kabupaten Bogor masih mengacu kepada nilai Inflasi Kota Bogor. □ Peningkatan permintaan masyarakat seiring dengan moment bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

□ Pengamanan ketersediaan pasokan Bahan Pokok dan langkah pengendalian Inflasi Daerah Triwulan II Tahun 2021 yaitu: a) Kegiatan Operasi Pasar, Bazar Murah dan Gelar Pangan Murah diantaranya : □ Kegiatan Operasi Pasar sebagai antisipasi kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian di 4 titik lokasi Pasar di Kabupaten Bogor. □ Untuk Kegiatan Bazar Murah yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Pertanian Holtikultura dan Perkebunan secara online. □ Gelar Pangan Murah oleh Dinas Ketahanan Pangan. b) Pada masa Pandemi Covid-19, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tidak melaksanakan Bazar, tetapi melaksanakan kegiatan pelatihan pembinaan usaha mikro kepada pelaku usaha dan memfasilitasi kemudahan perizinan Usaha Mikro. c) Bantuan sarana dan prasarana pertanian (benih, pupuk, obat-obatan dan alsintan) oleh Dinas Pertanian Holtikultura dan Perkebunan. d) Pembangunan / perbaikan jaringan irigasi oleh Dinas Pertanian Holtikultura dan Perkebunan. e) Gerakan membeli produk lokal (beras carita makmur) untuk seluruh ASN Kabupaten Bogor oleh Dinas Pertanian Holtikultura dan Perkebunan bekerjasama dengan Perumda Pasar Tohaga. □ Rakor TPID dalam rangka pengamanan Distribusi dan Pasokan Bahan Pokok Masyarakat menjelang dan memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2021/1442 H di Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh Wakil Bupati Bogor pada bulan April 2021. □ Di tengah Pandemi Covid-19, ketersediaan pangan menjadi hal yang krusial. Isu yang menjadi perhatian

utama adalah distribusi kebutuhan pokok masyarakat dari sentra produksi ke pasar hingga konsumen. Hal yang dilakukan Kabupaten Bogor adalah : □ Optimalisasi fungsi pasar untuk distribusi barang dan menjaga stabilitas harga. □ Mendorong transaksi online melalui kerja sama dengan pasar tradisional dan e-commerce. □ Penguatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) untuk memperluas akses informasi harga pangan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Distribusi Bahan Pokok Dan Upaya Stabilisasi Harga diantaranya : □ Perlunya optimalisasi sinkronisasi program kerja terkait pengendalian harga antar lembaga/ instansi terkait. □ Minimnya dukungan pasokan data pantauan harga pangan strategis di Kabupaten Bogor.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

□ Membuat aplikasi terkait stok harga kebutuhan pokok masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor. □ Pengembangan program Inklusi keuangan pada sektor Pertanian, Peternakan maupun UMKM Kabupaten Bogor.